



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS TERBUKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **PAKEN PANDIANGAN**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG SISTEM INFORMASI DAN KEMAHASISWAAN**
3. NHK : **638211**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.050.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/95 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 675.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/112 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
7. Tanah Seluas 2.000 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 1.068 m2/60 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 187.600.000

1. MOTOR, BEAT SPORTY CW Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 7.600.000



2. MOBIL, TOYOYA KIJANG INOVA Tahun 2012, HASIL SENDIRI

Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 400.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 84.037.614

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.721.637.614

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.721.637.614

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.